

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1978, *Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria II*, Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta.
- _____, 2000, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- David Osborn, Peter Plasterik, 2004, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, PPM, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1986, *Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*”, cetakan ketiga, CV.Rajawali, Jakarta.
- H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Irawan Soerojo, 2002, *Kepastian Hukum hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- J.S. Badudu, Sultan Muhammad Zain, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lijian Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Andy Offset, Yogyakarta.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KEPMENDAGRI No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jurnal :

Kodar Udoyono, *E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012.

Internet :

[Adityo Ari Wibowo,](#)

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/03/sekilas-tentang-hak-milik>

/diunduh 21 Desember 2014

